

JURNALIS

Tak Sesuai Peruntukan Program Dak Afirmasi Bidang Transportasi 2017, Lapakk Gelar Aksi Di Kejati Lampung

Tri - LAMPUNG.JURNALIS.ID

Jul 21, 2023 - 13:54



Lapakk Lampung Gelar aksi

Lampung -- Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Propinsi Lampung (LAPAKK) sebagai salah lembaga yang berkonsen terhadap upaya gerakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN di Indonesia khususnya di propinsi Lampung,

mempunyai keinginan yang besar terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Propinsi Lampung terutama pihak APH dari Kejaksaan Tinggi Lampung agar kiranya dapat melakukan proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan Program DAK Afirmasi Bidang Transportasi TA. 2017.



Nomor : UND. 276 /DPDTT/SI/PU/03/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017

Kepada Yth. (Daftar Terlampir)

Di -

Tempat

Dalam rangka telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maka dengan ini kami mengundang saudara untuk menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 yang akan diadakan pada :

Hari & Tanggal : Kamis - Jumat, 23-24 Maret 2017

Waktu : Jadwal Terlampir

Tempat : I. Registrasi (Kamis, 23 Maret 2017)

Hotel Discovery Ancol

II. Lodon Timur No.7, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

II. Acara (Jumat, 24 Maret 2017)

Balai Makarti Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

I. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan

Untuk konfirmasi kehadiran peserta dan informasi pelaksanaan acara dapat menghubungi panitia melalui email rcan@kemendes.go.id / ragapramswara@gmail.com atau menghubungi nomor telepon: 081212575826 (Raga) / 081384143958 (Lia). Panitia hanya menyediakan akomodasi kamar hotel untuk satu peserta pada saat acara sedangkan untuk biaya perjalanan dibiayai oleh masing-masing instansi. Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


Sekretaris Jenderal
Anwar Sanusi

Tembusan Yth. :
1. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Provinsi Kepulauan Riau

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lingga
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas

Provinsi Lampung

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TulangBawang
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji

Provinsi Riau

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan

Provinsi Sumatera Barat

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Bahwa sesuai Permendesa Nomor 9 tahun 2017 berdasarkan Data Daftar Metriks Kesepakatan Target Output diketahui Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapatkan Alokasi Anggaran Dana DAK Fisik Bidang Transportasi sebesar Rp. 4.664.596.000,- yang dilakokasikan untuk pengadaan Moda Transportasi Darat sebanyak 15 unit yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA. 2017.

Jenis Moda Transportasi Darat yang di adakan adalah Jenis kendaraan bermotor roda empat (4) dengan bak muatan terbuka dan memiliki kabin tunggal (single Cabin) untuk angkutan barang dan orang double gardan (4x4), sesuai informasi dari narasumber bahwa pelaksanaan pengadaan melalui metode E-katalog yang diadakan oleh penyedia yaitu PT. Lautan Berlian Motor cabang way lunak dengan Jenis kendaraan Strada Triton Single Cabin Type HDX 4x4.

Bahwa untuk daftar penerima Bantuan Hibah DAK Afirmasi Bidang Transportasi sudah ditentukan input lokasinya sesuai dengan Dokumen Kertas Kerja Hasil Kesepakatan Bersama Melalui Kegiatan Singkronasi dan Harmonisasi Usulan DAK Tahun 2017 dengan kriteria Unit Usaha BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) atau Koperasi, yang mekanisme Hibahnya tercantum sebagai Penyertaan Modal BUMDES/ Koperasi, dengan data penerima sebagai berikut :

1. Kampung Donomulyo Kec. Banjit
2. Kampung Bakti Negara Kec. Baradatu
3. Kampung Banjar Sakti Kec. Gunung Labuhan
4. Kampung Kota Way Kec. Kasui
5. Kampung Sri Rejeki Kec. Blambangan Umpu
6. Kampung Ramsai Kec. Way Tuba

7. Kampung Pisang Indah Kec. Bumi Agung
8. Kampung Bima Sakti Kec. Negeri Besar
9. Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga

Namun Fakta kenyataannya kendaraan tersebut tidak ada di BUMDES sesuai dengan data kampung - Kampung penerima bantuan tersebut, saat dikonfirmasi awak media Ketua LAPAKK Propinsi Lampung Nova menyampaikan bahwa “berdasarkan hasil pemantauan yang sudah kami lakukan di lapangan ditemukan fakta bahwa kendaraan tersebut di duga pakai dan digunakan untuk Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Pemerintah Kab. Way Kana, digunakan oleh beberapa oknum Anggota DPRD Kab. Way Kanan, Oknum Ketua PKH, KUD CT dan oknum kepala Kampung Bandar Dalam yang Notabnya merupakan Adik dari Oknum Mantan Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2017 serta oknum kerabat kroni bupati, yang pada intinya penggunaan dan keperuntukkan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang di buat oleh kementerian Desa daerah tertinggal dan transmigrasi”. ujarnya.

Nova menambahkan “Kami dari Lembaga Pemantau kebijakan Publik Ism L@pakk Prov Lampung berencana pada hari seni ini tanggal 24 juli 2023 sesuai dengan pemberitahuan kami ke Dinas perhubungan kabupaten Way kanan akan melakukan Aksi di Kajati Lampung agar Kajati Lampung dapat segera Memeriksa dan menetapkan tersangka mengenai permasalahan ini”.

Sambungkata “ Karna kami menduga keras bahwasanya telah terjadi kesalahan keperuntukan dan diduga telah terjadi mark-up harga pada saat pembelian Kendaraan Jenis Strada Triton yang dilakukan oleh PT Lautan Berlian Motor cabang way lunak terdapat selisih harga yang cukup signifikan semua telah kami lampirkan ke Dinas Perhubungan Way kanan dan akan Kami serah kan ke Kajati lampung sebagai acuan untuk memulai Penyidikan”. Tegasnya